

## Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Menjaga Integritas Publik di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut)

<sup>1</sup>Yayan Andri

<sup>1</sup>Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>1\*</sup>[Yayanandri26@gmail.com](mailto:Yayanandri26@gmail.com). 082164653807

**Abstract:** *The basic problem faced by the village government in implementing village funds is that negative assumptions arise from the public. So that the Village government is currently faced with low public trust in implementing Village Funds. The formulation of the problem in this study is the extent to which the implementation of the Use of Village Funds policy in increasing public trust carried out by Village implementers, studies in Sukamulya Village, Talegong District, Garut Regency, and the purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the policy on Use of village funds in Sukamulya Village, District Talegong, Garut Regency. Which had circulated issues related to the existence of demonstrations from some communities to the Sukamulya Village regarding the transparency of Village funds. The approach used in this research is a qualitative approach. The qualitative approach was chosen with the consideration that this method is expected to be able to obtain real data and be able to study the research problem in depth so that the expected results can be obtained. The theory used by researchers in this study is the theory of Edward III (in Agustino 2008: 153-154), there are four variables that influence the success of the policy implementation process, including: communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. From the results of the research, researchers found in the field related to the implementation of village fund management policies in Sukamulya Village, Kec. Talegong Regency. Garut has been going well. but in implementing the Village Fund policy in Sukamulya Village, Kec. Talegong Regency. Garut, based on the policy implementation variable, there are deficiencies that researchers encounter in the field, namely the bureaucratic structure, especially the lack of openness to the public or lack of clarity Standar Oprational Procedure (SOP) in the implementation aspect of Village Fund implementation in Sukamulya Village, Kec. Talegong Regency. arrowroot*

**Keywords:** *Policy Implementation, Village Fund*

**Abstrak:** Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah Desa dalam mengimplementasikan dana Desa adalah timbul praduga-praduga negatif dari publik. Sehingga pemerintah Desa saat ini di hadapkan dengan rendahnya kepercayaan publik dalam mengimplementasikan Dana Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kepercayaan publik yang dilakukan oleh pelaksana Desa, studi di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, serta tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Penggunaan dana desa di desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Yang mana sempat beredar isu terkait adanya aksi demo dari sebagian masyarakat kepada

pihak Desa Sukamulya terkait transparansi dana Desa. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang di harapkan. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori dari Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), terdapat empat variabel yang mempengaruhi dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, di antaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian, peneliti yang ditemukan dilapangan terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan dana desa di Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut sudah berjalan dengan baik. tetapi dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut, berdasarkan varameter implementasi kebijakan terdapat kekurangan yang peneliti temui di lapangan yaitu struktur birokrasi terutama kurang keterbukaan kepada publik atau kurang kejelasan *Standar Oprational Procedure* (SOP) dalam aspek pelaksanaan implementasi Dana Desa di Desa sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Dana Desa

## PENDAHULUAN

Pemerintah Desa belakangan ini di berikan kepercayaan khusus kepada pemerintahan desa dengan di keluarkannya kebijakan Dana Desa (DD). Pemerintah Desa sebagai lapisan terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat berupaya memaksimalkan sebaik mungkin dan seefektif mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitupun dalam proses menjalankan pemerintahan membutuhkan trobosan dan perencanaan yang matang dalam rangka memajuka desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa sendiri, yang kental dengan gotong royongnya.

Pembangunan desa menjadi penting bagi setiap negara Demokrasi, hal ini dikarenakan desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah. Permasalahan yang sangat Pundamental saat ini melihat eksisting dan kondisioning pemerintahan desa dengan adanya dana desa banyak menimbulkan presepsi-presepsi yang buruk dari publik. Dimana penulis merasa saat ini kepercayaan publik yang begitu menurun terhadap aparatur desa dalam mengimplementasikan dana desa. Hal tersebut tidak terlepas kurangnya di ikut sertakannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga publik berpandangan negatif dalam tatakelola Dana Desa. Sedangkan dalam pembangunan desa memerlukan dukungan dari berbagai aspek dalam mewujudkan pembangunan di desa yang

berkemajuan, dengan banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan baik pembangunan desa mencakup aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan.

Dalam rangka mewujudkan berbagai pekerjaan rumah yang harus di selesaikan baik dalam hal pengembangan dan pembangunan di desa tidak bisa di pungkiri tanpa ada dukungan materi dalam merealisasikan pembanguana di desan. Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan aspek esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*Auto Money*", sehingga dalam prakteknya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan serta menunjang berbagai keperluan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, dengan Misi berkembang dan transforan.

Dalam peraturan yang berlaku tentang peruntukan penggunaan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN hal tersebut tidak ada alasan lagi saat ini desa tidak melakukan lompatan yang berkembang dengan di tolong dari sisi Fiskal ada bantuan setiap tahunnya ke desa, begitupun pemerintah kabupaten Garut menselaraskan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam memajukan desanya terutama yang berdomisili di Garut bagian selatan, yang mana melihat letak geografis yang begitu jauh dari pusat pemerintahan yang harus segera mendapatkan asupan imunitas Finansial dalam mendukung pembanguana Desa.

Dalam mendukung pembangunan di desa saat ini di kenal dengan adanya bantuan atau yang selanjutnya disebut Dana Desa (DD) merupakan wujud konkrit dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. Dengan demikian Desa dapat tumbuh dan berkembang dalam pembangunan desa dan dapat mensejahterakan warga masyarakat desa. DD dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, walaupun DD belum berkontribusi secara masif mengurangi tingkat kemiskinan, namun dapat

mendorong partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (Darmi, T.,M. & Mujtahid, M. 2019)

Dengan adanya dana desa diperuntukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan membentuk serta mengembangkan Bumdes. Sehingga pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya pembangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan serta masyarakat desa tidak ketinggalan. Sehingga bantuan untuk desa dari tahun ketahun semakin meningkat Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sehingga terjadi pemerataan dilapisan warga masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi desa, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa supaya tidak salah target atau sasaran yang ingin di tuju, serta keterbukaan atau tranparansi pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan supaya praduga-praduga dari publik tidak bergejolak. Hal ini diperlukan kapasitas Aparatur desa yang mumpuni agar DD dapat dikelola dengan baik (Darmi, T., & Mujtahid, I. M. 2021).

Dana Desa bukan hanya untuk meningkatkan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda mendapat pekerjaan kreatif mengelola wisata atau istilah lainnya Dewi (Desa Wisata) yangmana bisa di kelola oleh Bumdes. Dana desa mampu mendorong kreativitas warga desa menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan sehingga Desa bisa mandiri dan bisa mengembangkan potensi yang ada dengan adanya Dana Desa tersebut.

Pemerintahan desa (Pemdes) Desa Sukamulya kecamatan Talegong kabupaten Garut Jawa barat pada akhir tahun 2019 merealisasikan Dana Desa (DD) untuk Pembanguna Jalan salah satunya. Dalam pengelolaan dana desa sudah di targetkan untuk direalisasikan buat jalan Desa yang sudah menjadi prioritas dan cita-cita masyarakat Desa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut

warga masyarakat sangat antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, dan kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya dan hasil musyawarah bersama, Pembangunan di Desa Sukamulya dalam mengimpelemntasikan dana desa sudah ada peningkatan dengan adanya bantuan Dana Desa ini, walaupun dalam pelaksanaannya secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa terealisasinya dimensi dari implementasi kebijakan mengenai karakteristik dari agen pelaksana yang mampu memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat sehingga ingin melibatkan diri dalam mensukseskan pembangunan melalui dana desa yang sudah diberikan.

Berbagai polemik di penghujung tahun 2019 dimana ada sebagian warga masyarakat yang kurang puas terhadap pembangunan di desa sukamulya dengan melihat eksisting yang ada dan melihat dana penunjang dari pusat yang selanjutnya di sebut dana desa, maka mengeluarkan ekspresi sikap dari sebgiaan warga masyarakat desa sukamulya untuk mengadakan aksi menyampaikan Aspirasinya. hal tersebut sudah menjadi wajar di negara Demokrasi dalam rangka mengeluarkan pendapat. Tetapi yang menjadi persoalan masyarakat sebagian memperlihatkan kurang percaya terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa dalam rangka mengelola dan merealisasikan dana desa.

Implementasi kebijakan Dana Desa di Sukamulya Kecamatan Talegong tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dikarenakan kurangnya pengalaman dan bahkan pengetahuan masyarakat untuk dapat mewujudkan tujuan dari dana desa tersebut. Antara lain, Pelaksana Dana Desa harus melakukan rangkaian proses administrasi formal pemerintah mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan musrembang tingkat Desa, melakukan model-model administrasi keuangan dan inventaris barang dan pertanggung jawabannya dan menggali aspirasi usulan masyarakat, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman

dengan adanya dana desa ini, seolah-olah sebagian masyarakat yang mempresepsikan dengan adanya dana desa.

Semua sudah terkaper sehingga budaya swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan menjadi sulit dan acuh tak acuh. Permasalahan dalam pelaksanaan DD dijumpai juga pada kemampuan pendapatan asli desa dalam mendukung implementasi kebijakan DD. Selain itu, permasalahan lain terlihat dari partisipasi masyarakat desa dalam mendukung kegiatan DD juga masih rendah.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yaitu, pertama, tingginya bantuan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa setiap tahunnya. Kedua, belum berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat desa (BPD) dalam hal ini sebagai pengawas di tingkat Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi pembangunan. Ketiga, masih rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa. Keempat, masih kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari bantuan dana desa atau tranfarasi yang di lakukan oleh aparatur desa masih rendah. Sehingga Kepercayaan Publik terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamulya Kab. Garut masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan presepsi-presepsi yang berfariatip.

## **METODE**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Menurut Moleong (2009:3) bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode kualitatif dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat di peroleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah peneliti secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.

Penelitian kualitatif memiliki kekuatan terutama berasal dari pendekatan induktif yang fokus pada situasi yang spesifik serta penekanan terhadap kata-kata bukan angka. Maka penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mampu mendeskripsikan secara terperinci berdasarkan keadaan dan realita yang ditemui oleh peneliti di lapangan, sehingga mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sehingga penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Di samping itu hanya metode kualitatif yang mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah sistem. Tidak hanya itu, penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan dan keberadaan teori dalam metode kualitatif tidak untuk diuji dalam rangka mencari kebenaran.

Model Implementasi kebijakan sebagaimana yang di kemukakan oleh *Goerge C. Edward III* (dalam Agustino, 2008:149-154), menamakan model implementasi kebijakan publik dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu diantaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi, dalam variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi dimana komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sehingga dalam implementasi kebijakan menurut *Edward* Terdapat tiga indikator utama yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel pertama yaitu komunikasi di antaranya : (a) Tranmisi (b) Kejelasan. (c) Konsisten.

Sumberdaya, dimana variabel yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumber daya merupakan hal penting dalam suatu proses implementasi kebijakan, menurut *Goerge C. Edward III* (dalam Agustino, 2008:151-152), yaitu : (a). Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. (b). Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. (c). Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. (d). Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi, Variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut *Goerge C. Edward III* (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah: (a). Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. (b). Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self inters*) atau organisasi.

Struktur Birokrasi, variabel yang ke empat menurut Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama birokrasi yakni : (a). *Standar Oprational Procedure* (SOP), SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”(Winarno 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk mengangulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. (b). Fargmentasi, Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “ fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi “. Semakin kurang kebrhasilan suatu program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.

Pembangunan Desa Secara etimologis yaitu pengembangan yang berasal dari serapan bahasa Inggris, yakni *development*. Di Indonesia, kata *development* diartikan bukan hanya pengembangan saja, melainkan dapat diartikan sebagai pembangunan. Meskipun, dua padangan kata tersebut sering diartikan berbeda, namun bila secara etimologis kedua kata tersebut sama merujuk pada kata *development*.

Secara teoritis, konsep pembangunan lebih awal diperkenalkan, meskipun pengenalan konsep pembangunan masih merujuk pada

pembangunan dalam konsep ekonomi, karena perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep ekonomi, pembangunan memiliki enam pendekatan, yakni pendekatan pertumbuhan, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan tata ekonomi Internasional baru, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dalam memajukan desa saat ini.

Konsep pembangunan terjadi pergeseran dari pembangunan yang berpusat pada produksi dan ekonomi menjadi pembangunan yang berpusat pada rakyat/ masyarakat. Sehingga pembangunan dalam berbagai hal bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial, yakni pemikiran, sistem masyarakat serta sistem kepemilikan dan pengendalian lokal. Pergeseran tersebut melahirkan konsep pengembangan masyarakat yang merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial, keswadayaan lokal, dan prinsip *sustainability* (keberlanjutan). (Nasdian, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan kebijakan Dana Desa. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan oleh beberapa hal selain karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung juga disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan untuk memahami maksud dan tujuan kebijakan sebenarnya.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong tidak terlepas dari empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi dimana peranan tersebut terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

### **Komunikasi**

Menurut Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek komunikasi yaitu untuk indikator intensitas komunikasi. kejelasan informasi, kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi isi kebijakan dari berbagai jenis proses kegiatan seperti sosialisasi. pengawasan, pendampingan serta pengendalian kegiatan yang dilakukan pelaksana kegiatan baik ditingkat kabupaten sebagai tim fasilitasi, tingkat kecamatan dan tingkat desa sebagai tim pelaksana teknis yang merealisasikan suatu program yang di dukung oleh dana desa.

Berdasarkan temuan dilapangan peneliti melihat aspek komunikasi pada implementasi kebijakan Dana Desa di desa sukamulya kecamatan talegong kabupaten garut masih harus ditingkatkan, dimana dalam proses perumusan masih harus banyak merangkul stakholder terkait terutama dalam Musrembang tingkat Desa. Begitupun dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh pihak kabupaten, kecamatan maupun sosialisasi dari pihak desa kepada warga masyarakat dalam merencanakan terkait perkembangan dan pembangunan yang merata kepada masyarakat serta harus mampu menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan. Maka dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan jelas akan selaras dengan kemauan yang bisa di realisasikan dalam bentuk pembangunan dengan dukungan dana desa.

Sebgaimana hasil wawancara dengan kepala desa sukamulya diman kepala desa mengungkapkan diman pada akhir 2019 pernah terjadi suatu aspirasi dalam bentuk Aksi (Demo) yang di sampaikan oleh sebagian warga masyarakat desa sukamulya, yang mana banyak tuntutan yang di sampaikan terkait keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa dana desa akan kami sampaikan dan kami laporkan sebijak mungkin. Tetapi sulit untuk membendung kecurigaan-kecurigaan dari warga

masyarakat yang memang kami juga dari aparaturnya desa harus memahaminya bahwa dinamika seperti itu merupakan bagian dari demokrasi, seiring berjalannya waktu saya bukti sebagai kepala desa dimana kalau terjadi berbagai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh kami dari aparat desa kami siap untuk menerima sanksinya, tapi sampai saat ini belum ada bukti hal tersebut terkait adanya pelanggaran yang kami lakukan di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.

Sehingga peneliti lihat mungkin saja dengan adanya aksi demo tersebut bahkan dalam aksinya tersebut sebagian warga masyarakat desa sukamulya mengundang media bahkan sempat viral juga di Youtube dan media lokal lainnya. Hal tersebut menandakan adanya kekecewaan dari sebagian warga masyarakat terkait pengelolaan dana desa, walaupun tidak ada bukti pelanggaran-pelanggaran yang sampai dilakukan oleh pihak berwajib.

### **Sumberdaya**

Dalam konteks variabel yang kedua yaitu sumberdaya dimana sumber daya yang dimiliki oleh aparaturnya pemerintah desa sukamulya cukup baik atau bisa dikatakan merata walaupun didominasi oleh SMA dan Sarjana. Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek sumberdaya yaitu untuk indikator sumberdaya manusia dan sumberdaya fasilitas pendukung, yang diamati antara lain pendidikan, dan keterampilan pelaksana tingkat desa, yang mana menunjukkan pengelolaan atau skill dalam mengurus pemerintahan desa terutama dengan adanya dana desa mampu mengoptimalkan dengan potensi SDM yang ada, begitupun dilihat dari kemampuan sumberdaya fasilitas baik sarana Gedung, Kendaraan Operasional, sarana prasarana baik komputer maupun penunjang lainnya sudah cukup untuk mendukung jalannya pemerintahan.

Dari penyajian hasil aspek sumberdaya yaitu sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana secara pendidikan rata-rata SMA walaupun sebagian ada sarjana sehingga bisa menyesuaikan dan lincah dalam hal pelaporan dan lain sebagainya. Sedangkan hasil penelitian untuk indikator fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dan pendapatan

desa lainnya masih kurang, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi, dan ATK dari dana desa. Demikian juga sebagian masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan dana desa melalui swadaya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang di lontarkan oleh kepala desa sukamulya, dimana dalam menyiapkan SDM maupun Sumber daya fasilitas kami maksimalkan sebagian dari dana desa untuk mendukung berjalannya pemerintahan di desa, tetapi kami juga terusterang sampai saat ini belum ada usaha desa yang bisa kami kebangkan kalau terkait dengan rencana sebenarnya sudah banyak tutur kepala desa tapi yang menjadi kendali kami di dasa adalah belum sepenuhnya terencana dengan matang dalam memanfaatkan dana desa ini. Mudah-mudahan kedepanya dengan adanya dana desa ini kami bisa meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

### **Disposisi**

Menurut Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan besar dan penting bagi suatu implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan bahwa dalam variabel disposisi dalam pelaksanaan implementasi dana desa sudah mengikuti alur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pihak aparat desa sukamulya berusaha menunjukkan Sikap dan reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak dalam rangka meng implementasikan agenda-agenda yang telah di rancang dan di sepakati oleh berbagai pihak. Begitupun dari aspek sikap pelaksana yaitu indikator persepsi, respon dan tindakan pelaksana, yang diamati adalah bagaimana penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan yang di keluarkan, seperti sikap pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan yang melibatkan dana desa.

Dalam implementasi dana desa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan serta mendukung dalam pembangunan

desa. Begitupun yang peneliti temukan di lapangan bahwa pelaksana memiliki respon yang baik terhadap kebijakan dana desa yang di rencanakan, begitupun berharap kedepannya dengan adanya dana desa bisa berkembang dan memberikan kemajuan yang pesat untuk desa sehingga desa tidak lagi sebagai daerah yang tertinggal. Begitupun berbagai sikap tindakan-tindakan saling bersinergi dengan pihak dari kecamatan maupun dari kabupaten.

### **Struktur Birokrasi**

Begitupun berdasarkan variabel yang ke empat yaitu struktur birokrasi, dimana dalam hal mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada harus mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada. dimana kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Berbagai stholder terkait dari struktur birokrasi struktur birokrasi yang diamati oleh peneliti yaitu proses pengelola Dana Desa , baik pembagian tugas antara kepala desa, bendahara, BPD, dan perangkat desa lainnya serta kordinasi diantaranya harus saling bersinergi dan terstruktur dengan baik.

Dari hasil penelitian dilapangan aspek struktur birokrasi terungkap bahwa belum ada struktur organisasi pelaksana Dana Desa, walaupun pihak kecamatan mengatakan sudah ada stuktur organisasi namun dalam petunjuk teknis tidak tertera tentang struktur organisasi pelaksana Dana Desa. Demikian halnya dalam pembagian tugas tidak ada kejelasan yang pasti dalam struktur atau belum tersusunnya Sop yang jelas, sehingga hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana DD melakukan pembagian tugas, sehingga pelaksana tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan DD sehingga tidak ada kejelasan. Begitupun hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik antar pelaksana dana desa, hal tersebut yang menyebabkan muncul presepsi-presepsi dari publik sehingga

tatkala dinya terkait pertanggung jawaban bisa saja saling lempar antara pengelola dana desa di desa sukamulya sehingga sebagai warga masyarakat ada yang men jastifikasi dan menjadi control bentuk partisipasi mayarakat dalam kontek ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil analisis implementasi kebijakan Dana Desa menunjukkan bahwa kemampuan pelaksana desa dalam Pengelola keuangan desa masih harus di tingkatkan, walaupun secara keseluruhan dalam pengelolaan sudah cukup transparan tetapi ada beberapa yang perlu di tingkat kan terutam dalam pengelolaan barang inventaris, antara lain masih lemahnya sistem pengendalian internal. masih adanya pencatatan yang tidak akurat dan kelemahan dalam pencatatan. Hal tersebut diatas berkaitan dengan pengendalian kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tentang pedoman pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa sudah Cukup baik walupun perlu di tingkatkan dalam tatakelolanya sehingga masyarakat tidak mencurigai terkait penggunaan dana desa walaupun di tahun 2020 anggaran Dana Desa di *Recopusing* ke penanganan pandemi covid-19, dalam konteks ini tetap penyelenggara desa harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat supaya tidak terjadi paraduga-praduga.

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Talegong khususnya di Desa Sukamulya, dari keempat Variabel Implementasi Kebijakan menjadi sangat penting dalam mengsucceskan kebijakan. Jika komunikasi dilakukan dengan baik maka pesan kebijakan akan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Demikian halnya dengan sumberdaya yang memadai akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Sikap pelaksana juga menjadi aspek

penting dalam implementasi kebijakan. dengan dukungan sikap pelaksana menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang diberikan sehingga memudahkan pelaksana mendorong partisipasi masyarakat. Begitupun dengan struktur birokrasi. dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka pembagian tugas antara pelaksana program akan berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya struktur birokrasi terutama kurang keterbukaan kepada publik atau kurang kejelasan *Standar Oprational Procedure* (SOP) dalam aspek pelaksanaan implementasi Dana Desa di Desa sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut. Bisa di tingkatkan dalam menjaga kepercayaan publik.

### **Saran**

Berangkat dari kesimpulan penelitian tersebut, maka secara praktis peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Harus semakin ditingkatkan keterbukaan dalam penggunaan dana desa supaya tidak timbul prasangka buruk dari publik.
2. Implementasi kebijakan harus senantiasa bersifat Tofdown sebagaimana SOP yang telah di tentukan oleh Kementerian Desa.
3. Dalam pelaporan dana desa harus sampai kepada lapisan masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan marwah pemerintah desa
4. Pemerintah Desa harus mampu mengembangkan inovasi yang produktif Pasca Pandemi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bewa Ragawino.2005. Sistem Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Padjadjaran.
- Chalid Pheni. 2010. Teori danlsu Pembangunan. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Darmi, T.,.M. & Mujtahid, M ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Journal of Indonesian Public

Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.

- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 195-205.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Ana/isis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington Congressional Quarterly Inc.
- Ikhsan M, Santoso Agus, Harmanti. 201 1. Administrasi Keuangan Publik. Jakarta Penerbit Universitas Terbuka.
- Islamy, Irfan M. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
- Iswanto Yun. 2005. Manajemen Sumber Daya Xfwwsiu. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Kismartini, dkk. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy. 2001. .Metodologi Penelitian Kualilatif. Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarnayanti Hj. 2004. Good Governance. Bandung. Penerbit Mandar Maju
- Sundarso, dkk. 201 I. Teori Administrasi. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Thoha, Mifta 1983. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Univerasitas Gajah Marla. Penerbit PT RajaGrapindo Persada.
- Wasistiono, Sadu. 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung. Penerbit Alqaprint Jatinangor.
- Widjaja, Haw. Otonomi Daerah dan Daerah Oronom. 2001. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. Good Go\ernance. 2001. Sidoarjo. Penerbit Insan Cendekia.
- Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada